



## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO

Fibriyanti S. Lakoro\*

Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Pemerintahan & Sektor Publik,  
Universitas Bina Mandiri Gorontalo  
fibriyantilakoro@ubmg.ac.id

### Abstract

*The Manpower and Transmigration Service of Boalemo Regency, the hardest problem in this case is the system and the budget portion which is considered very minimal so that it has an impact on development in Boalemo Regency. The aim of the research is to determine the effectiveness of budget implementation at the Boalemo Regency Manpower and Transmigration Service. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection methods through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The research result is Budget sources originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget must be utilized through the General Allocation Fund. Where the implementation and allocation of the budget must include the availability of land, in this case facilities and infrastructure to support workforce activities such as job fairs, the availability of facilities and infrastructure such as Job Training Centers that can help job seekers from both companies and prospective employees.*

**Keywords:** Effectiveness, Budget, Department.

### Abstrak

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo persoalan terberat dalam hal ini sistem dan porsi anggaran yang dinilai sangat minim sehingga memberikan dampak dalam pembangunan di Kabupaten Boalemo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian adalah sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dimanfaatkan melalui Dana Alokasi Umum. Di mana pelaksanaan dan pengalokasian anggaran harus memuat seperti tersedianya lahan dalam hal ini sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tenaga kerja seperti job fair, tersedianya sarana dan prasarana seperti Balai Latihan Kerja yang dapat membantu pencari kerja baik dari perusahaan dan calon karyawan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Anggaran, Dinas

Diterima Redaksi: 07-05-2024 | Selesai Revisi: 25-06-2024 | Publikasi Online 29-06-2024

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dalam mendukung dan melayani masyarakat. Terutama dalam mendukung peningkatan ekonomi yang memang sangat tinggi dengan bentuk berkelanjutan. Sehingga perlu adanya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pengetahuan dan teknologi diperlukan pengembangan sumber daya di setiap daerah. Sehingga perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui pengetahuan dan teknologi. Sehingga adanya pengembangan sumber daya manusia melalui salah satu faktor penting dalam mendukung teknologi serta harus sesuai dengan kebutuhan struktural ekonomi (Dwiarsyah, T., Lizar, A., & Yefriza, 2021).



Kebijakan ini perlu adanya dukungan dengan mendirikan lapangan kerja dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan dan sektor pekerjaan secara informal. Kebutuhan yang menjadi salah satu perlindungan yang memang sangat layak. Sehingga sangat mampu terwujudnya proses dalam menyelesaikan masalah industri dalam memberikan kepuasan pada pihak pasar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memang sudah ditetapkan harus mampu mencapai realisasi yang di dalamnya melingkupi realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Dalam hal ini, memang sangat perlu adanya peran Gubernur/Bupati/Walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau melalui rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berjalan atau yang akan dibahas. Sehingga adanya ketidakadilan antara anggaran dalam hal ini melayani rakyat dengan anggaran yang memang melayani kepala daerah. Sehingga perlu adanya prioritas dan adanya musibah yang menyebabkan kenaikan anggaran. Tetapi adanya perbedaan jauh dengan anggaran yang memang sifatnya melayani kepala daerah.

Belum lagi anggaran dalam kategori fasilitas rumah dinas dan fasilitas yang melayani tamu dengan nilai yang mencapai miliaran rupiah. Anggaran pada satu SKPD atau OPD dengan nilai miliaran rupiah yang memiliki sifat melayani kepala daerah. Sementara anggaran SKPD/OPD yang melayani masyarakat sangatlah minim, sehingga sangat miris adanya ketidakadilan yang sangat jelas. Padahal beberapa prioritas seperti pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan dengan adanya dukungan anggaran seperti teknologi untuk mendukung kebutuhan pembangunan di sektor ekonomi. Sehingga perlu adanya komposisi dengan anggaran sehingga dapat direvisi sesuai dengan arah dan layanan pada masyarakat. Tetapi risiko dalam hal ini lebih menekankan pada urusan pilihan yang adanya pengelolaan keuangan daerah yang harusnya dilaksanakan sesuai kebijakan.

Pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana adanya kewenangan sesuai kebijakan perlu adanya keterkaitan sehingga kejelasan anggaran sesuai dengan arah, tujuan dan target sesuai kegunaan anggaran. Sehingga dapat menggambarkan percepatan anggaran pada APBD/APBN Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Bahkan dalam mengukur sejauh mana realisasi paling lambat pada bulan November. Sehingga sangat diharapkan adanya apresiasi pada OPD/SKPD yang sebagai pelaksana dan harapan kondisi yang dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

Dalam memaksimalkan penyelenggaraan keuangan terutama pada daerah dengan baik setiap tahunnya. Maka organisasi perangkat daerah harus mampu memasukkan instrumen-instrumen pengelolaan keuangan daerah yang memang sangat dibutuhkan. Instrumen yang dimasukkan seperti pengusulan KPA, PPTK dan bendahara OPD yang memiliki fungsi dalam melaksanakan, mengatur, mengarahkan dan mengontrol penyelenggaraan keuangan daerah. Sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban laporan yang disusun dan dibuat sesuai kebutuhan, hanya saja masih adanya kendala seperti identifikasi sumber daya, evaluasi terbatas dalam melaksanakan dinilai belum



menunjukkan pada pelaksanaan yang belum menunjukkan kegiatan sesuai orientasi hasil dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (Febriantoko, 2017).

Bupati/Walikota hingga Gubernur harus mampu memberikan instruksi pada setiap OPD dalam menyiapkan dokumen laporan pemerintahan daerah. Penyiapan dokumen dalam hal ini pelaporan pemerintah daerah menjadi hal yang memang sangatlah penting yang harus mampu disiapkan OPD contohnya SPJ dan laporan kinerja pemerintah (LAKIP) serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja setiap Kepala Daerah harus mampu mempertanggungjawabkan pada DPRD yang memiliki hubungan dengan pemerintah daerah sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan optimal pada Kepala Daerah dengan langsung (Aji, 2019). Memang percepatan serapan anggaran dalam hal ini APBD setiap tahun. Maka harus adanya bentuk percepatan serapan APBD yang bagian dari arahan pemerintahan pusat. Buktinya secara jelas adalah secara tidak langsung yang memang terpecik positif dalam roda putaran roda ekonomi masyarakat. Selain itu, percepatan serapan APBD harus dapat diselaraskan dalam memenuhi kebutuhan kerja OPD yang sesuai dengan harapan realisasi program dan kegiatan pada OPD.

Peneliti telah melakukan observasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo yang selama ini menekankan pada efektivitas pelaksanaan anggaran dalam hal ini APBD. Ternyata ada beberapa masalah yang ditemukan seperti rendahnya realisasi pendapatan dan belanja APBD. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo seperti masih adanya pemutusan hubungan kerja sepihak pada beberapa perusahaan dan juga terdapat beberapa pekerja yang tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, harapannya baik Pemerintah Daerah Boalemo harus memberikan perhatian pada perusahaan nakal dan sengaja menerapkan aturan yang kurang baik pada karyawan. Selain peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, masyarakat tentu berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memiliki kewenangan terhadap perusahaan yang melakukan investasi Kabupaten Boalemo

Dengan adanya anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo harus mampu memaksimalkan dengan memberikan wadah pada masyarakat seperti diketahui Boalemo belum maksimal dari sisi memberikan lapangan pekerjaan atau menggelar bursa lapangan kerja atau *job fair*. Penyebabnya karena tidak adanya gedung pendukung atau gedung serba guna yang bisa digunakan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan perusahaan dalam mencari karyawan. Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo diharapkan mampu menyiapkan anggaran yang memang menjadi prioritas dalam membangun Balai Latihan Kerja demi menunjang para karyawan atau calon tenaga kerja. Pembangunan BLK menjadi tahapan yang harus mampu direalisasi demi memaksimalkan anggaran secara efektif di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Karena selama ini prioritas anggaran harus diefektifkan bagi calon karyawan atau perusahaan dan Balai Latihan Kerja sebagai gedung serba guna yang dapat dikelola dengan baik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peneliti lebih menekankan judul penelitian Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Di Dinas Tenaga Kerja dan



Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Efektivitas**

Efektif biasa dalam bahasa inggris disebut *effective* yang dijelaskan sebagai sesuatu yang dikerjakan dan berhasil dengan baik. Efektivitas menjadi bagian yang dilakukan dengan pengukuran sesuai dengan tingkat pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimana efektivitas bisa diukur sesuai dengan target yang meliputi kuantitas, kualitas dan waktu yang memang akan dicapai. Sehingga pengukuran dilakukan dengan persentase target yang akan dicapai yang makin tinggi efektivitasnya (Punto, 2014). Efektivitas merupakan ukuran dalam melihat keberhasilan tujuan yang akan dicapai sehingga pada organisasi dan kegiatan lainnya (Salahudin, I., Nugroho, G. W., & Kartini, 2020).

Efektivitas adalah hubungan dalam bentuk *output* sesuai pencapaian tujuan. Sehingga makin memberikan sumbangan *output* sesuai dengan target tujuan sehingga efektif pada organisasi, program dan kegiatan (Mahmudi, 2015). Konsep efektivitas dalam organisasi dapat disesuaikan dengan dimensi waktu. Dimana dapat diklasifikasikan dengan teori sistem (1) kriteria efektivitas sesuai dengan refleksi sesuai siklus input-proses-output, (2) kriteria efektivitas harus didasarkan pada refleksi hubungan organisasi dengan lingkungan lainnya. Efektivitas merupakan ketepatan, hasil guna, menunjang tujuan (John Ivancevich dkk, 2016). Efektivitas menjadi pengukuran yang memang didasarkan pada sasaran dan tujuan yang memang sudah ditentukan sebelumnya.

### **Indikator Efektivitas**

Reigeluth dan Merrill menjelaskan dalam 4 indikator yang digunakan mengukur efektivitas antara lain.

1. Kecermatan dalam penguasaan perilaku sesuai pelajaran,
2. Percepatan dalam unjuk kerja,
3. Meningkatkan alih belajar,
4. Meningkatkan retensi sesuai yang akan dipelajari.

Degeng menjelaskan 3 indikator sesuai pencapaian efektivitas antara lain sebagai berikut.

1. Kesesuaian prosedur,
2. Kuantitas unjuk kerja,
3. Kualitas hasil akhir (Subiyanto, 2021).

Indikator efektivitas harus memberikan gambaran jangkauan yang memberikan dampak dari luaran program yang sesuai dengan tujuan. Sehingga kontribusi output harus dihasilkan dalam mencapai tujuan serta sasaran agar sudah ditetapkan, sehingga mampu secara efektif dalam proses kerja pada organisasi (Agusti, W. O. D., & Mahmuda, 2021). Indikator efektivitas dapat diukur melalui beberapa hal seperti berikut.

1. Strategi pencapaian tujuan program dan perumusan kebijakan program,



2. Menyusun program tepat,
3. Menyediakan sarana dan prasarana,
4. Efektivitas operasional program,
5. Efektivitas fungsional program,
6. Efektivitas tujuan dan sasaran program,
7. Efektivitas individu dalam melaksanakan kebijakan program,
8. Efektivitas unit kerja dalam melaksanakan kebijakan program (Sutra, M. A. A., & Prabawa, 2020).

### **Pendekatan Terhadap Efektivitas**

Pendekatan efektivitas dapat dilaksanakan sesuai dengan acuan pada beberapa lembaga, sehingga lembaga yang didapatkan pada *input* atau masukan sesuai dengan sumber. Kegiatan yang dilakukan melalui proses internal dilaksanakan dan dilakukan untuk mengubah *input* dan *output* sesuai program sesuai dengan kebutuhan yang dilemparkan lingkungannya. (1) Pendekatan sasaran dilakukan sesuai dalam mengukur sejauh mana lembaga yang mampu merealisasikan sasaran yang akan dicapai, (2) Pendekatan sumber diukur sesuai efektivitas dalam mengukur keberhasilan lembaga sesuai dengan sumber dan pemeliharaan keadaan pada sistem dengan efektif, (3) Pendekatan proses yang dilakukan sesuai dengan efisien dan kondisi kesehatan pada lembaga internal (Kemuning, 2018).

Efektivitas dapat dilaksanakan sebagai tolak ukur dari *output* yang dapat dihasilkan. Pencapaian efektivitas perusahaan yang saling berkaitan dengan unsur utama pada sistem, organisasi, bagaimana unsur yang saling memberikan pengaruh, memberikan kemudahan atau memberikan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sesuai dukungan kegiatan operasional (Rahmadhani, 2018).

### **Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas yang memang dilaksanakan dengan mengukur sesuai dengan prestasi, produktivitas serta laba sesuai dengan rancangan berdasarkan pada konsep di kerangka kerja dimana satu, dengan pemusatan pada perhatian 1 kriteria evaluasi

Dalam mengukur efektivitas berdasarkan pada sasaran yang memang terjadi dengan diberikan dalam mengukur efektivitas dalam memperhatikan masalah yang ditimbulkan seperti.

1. Terdiri dari macam-macam *output* sehingga memang memperoleh sesuai dengan langkah dalam mengukur efektivitas melalui pendekatan sasaran yang dilaksanakan.
2. Subjektif dalam hal ini, penelitian yang dilaksanakan tetapi mengalami hambatan, sehingga sulitnya dalam melaksanakan identifikasi sasaran yang terjadi serta kesulitan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.



### **Anggaran**

Anggaran adalah rencana yang tersusun dengan sistematis untuk membentuk angka yang memang dapat dinyatakan dalam satuan moneter serta mencakup kegiatan pada perusahaan sesuai dengan periode di masa depan (Fuad, M., 2020). *Budget* yang biasa disebut anggaran merupakan rencana yang tersusun pada organisasi bisnis dan jasa dengan sistematis dan terinci yang biasa dinyatakan dalam bentuk kuantitatif melalui bentuk barang dan jasa yang berlaku pada periode yang akan datang (Suhardi, 2019). Bahkan anggaran biasa disebut sebagai rencana kegiatan yang dilaksanakan manajemen selama satu periode dengan kuantitatif (Sasongko, Catur dan Parulian, 2019). Sehingga informasi yang didapatkan dari anggaran dalam bentuk jumlah produk dan harga jualnya pada tahun depan.

### **Fungsi Anggaran**

Fungsi anggaran (*budget*) memiliki fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Pedoman kerja perusahaan,
2. Perencanaan terpadu,
3. Koordinasi kerja,
4. Pengawasan kerja
5. Evaluasi perusahaan (Suhardi, 2019).

Fungsi anggaran seperti *bussiness budget* merupakan *financial plan*. Usaha manusia yang memang lebih banyak berhasil sehingga dapat ditunjang sesuai dengan kebijaksanaan dalam perencanaan yang harus matang (Dewi, S., & Yanto, 2021).

### **Tujuan Anggaran**

Tujuan yang dibuatkan dalam *budget* (anggaran) seperti.

1. Memberikan harapan dan sasaran pada perusahaan dengan forma serta jelas untuk kebutuhan arah sehingga sesuai dengan pencapaian organisasi dan perusahaan.
2. Melaksanakan komunikasi dan harapan manajemen pada beberapa pihak yang memiliki hubungan anggaran yang baik yang dilaksanakan dengan benar.
3. Dalam perencanaan sesuai rincian yang dilaksanakan aktivitas atau kegiatan pada periode dengan ketidakpastian pencapaian tujuan yang memang diharapkan perusahaan atau organisasi.
4. Melakukan koordinasi dengan perlu secara maksimal pada sumber daya.
5. Alat ukur untuk mengendalikan kinerja karyawan dan departemen.

### **Kegunaan Anggaran**

Anggaran adalah penentu dalam kegiatan perusahaan yang akan datang. Kegunaan anggaran dalam perusahaan harus mampu membuat anggaran (Fuad, M., 2020). Sehingga belum terlaksananya penyusunan anggaran, perusahaan yang memang sulit dalam pencapaian kinerja sehingga tidak optimalkan secara efisien dan produktivitas dan kurang memberikan manfaat kesempatan dalam memperluas usaha. Manfaat dalam penyusunan anggaran antara lain:

1. Perencanaan terpadu,





2. Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan,
3. Alat koordinasi,
4. Alat pengawasan kerja.
5. Alat evaluasi kegiatan perusahaan.

### **Menyusun Anggaran**

Anggaran didasarkan cara penyusunan, anggaran dibagi antara lain:

1. Anggaran periodik dimana anggaran akan disusun sesuai periode yang biasa dilaksanakan pada akhir periode.
2. Anggaran kontinu yang dilakukan dengan berkala sesuai dengan tujuan berkesinambungan pada anggaran pada periode sebelumnya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian melalui pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dengan menekankan dalam pencairan pengertian, konsep, simbol, karakteristik dan deskriptif melalui hal-hal ini terkait fenomena yang bersifat holistik, multi metode dan lainnya yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif (Yusuf, 2019). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan jenis deskriptif dengan melaksanakan dan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.

Rancangan penelitian kualitatif bersifat sementara untuk dengan melaksanakan penelitian sesuai dengan kebutuhan pada objek penelitian (Sugiyono, 2020). Penelitian lebih fokus pada memberikan jawaban atas penelitian yang diteliti dengan sistematis. Sumber data yang dapat digunakan adalah sumber data primer dengan wawancara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Pengumpulan data yang dapat digunakan melalui sumber data primer seperti observasi, dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam mengetahui dan melihat aktivitas pada lingkungan internal dan eksternal (Yusuf, 2019). Teknik observasi secara langsung dalam hal ini kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo.

Metode pengumpulan data selanjutnya wawancara, metode pengumpulan data pada kejadian dengan proses interaksi antara peneliti dengan informan dengan menggunakan wawancara terencana-terstruktur. Sesuai dengan tujuan wawancara yang berlangsung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Selain itu, metode pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi yang dilakukan catatan sesuatu yang sesuai dengan situasi sosial pada fokus penelitian sebagai informasi penelitian kualitatif (Yusuf, 2019). Dokumentasi digunakan sebagai kelengkapan data yang diperoleh dalam hal ini pada observasi dan wawancara. Dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk data yang didapatkan dari faktor pendukung dalam memudahkan peneliti dalam menyusun teori dalam hal ini, validasi data.

Alat perolehan data yang digunakan dalam penelitian dengan memakai handphone sebagai alat bantu rekaman dalam pelaksanaan wawancara serta



melakukan dokumentasi dalam bentuk bukti gambar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Selain itu, melalui dokumen lain seperti Undang-Undang, pedoman, artikel atau dokumen yang secara teoritis. Teknik penyajian data yang digunakan selanjutnya melalui penyajian data kualitatif yang sesuai dengan data yang diperoleh sesuai dengan pola hubungan. Teknik penyajian data yang disesuaikan dengan kebutuhan data sesuai dengan kebutuhan data sesuai dengan perkembangan pada hubungan yang ada. Metode analisis data melalui model Miles dan Huberman (Hamzah, 2020) dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk Perencanaan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo perlu dilaksanakan penelitian melalui wawancara dengan memperoleh dengan mendapatkan beberapa hal di dalamnya terkait dengan APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo didasarkan dalam peraturan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

### **Perencanaan Anggaran**

Perencanaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memang harus dilakukan berdasarkan tahapannya, seperti wawancara dengan NA (Bendahara) mengatakan perencanaan yang dilaksanakan harus selesai pada akhir tahun anggaran cukup efektif. Karena biasa direncanakan di awal tahun dalam pelaksanaan terutama kegiatan/program sesuai dengan besarnya bidang/bidang yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan dana yang sudah dianggarkan harus dapat dikembalikan ke daerah. Sehingga adanya solusinya dengan masing-masing bidang dalam perencanaan program yang dianggap sangat penting. Sehingga dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan sebelumnya pada apa yang dianggarkan dapat dimanfaatkan sebaiknya ditahap awal.

Perencanaan anggaran perlu dilakukan 3 bulan pada tahun anggaran baru sangat efektif. Sehingga perencanaan dalam hal ini dilaksanakan dan disusun dengan prosedur yang ada. Salah satu penelitian perencanaan anggaran terutama pada pos belanja modal sangat diharapkan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat (Ratag et al., 2019). Pendapat ini dibantu dengan hasil wawancara dengan LP (staf) mengatakan bahwa perencanaan yang disusun berdasarkan bidang yang memang sangat efektif. Sehingga mampu disusun sesuai dengan rencana yang memang harus dilaksanakan pada sasaran serta tujuan yang memang direncanakan sebelumnya. Sehingga perencanaan anggaran khususnya APBD di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo dengan penilaian yang sangat efektif.

Sehingga masing-masing bidang-bidang harus mampu melihat kegiatan atau program yang direncanakan masing-masing bidang dan melalui musyawarah dengan kepada bidang dan pegawainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk mampu merealisasikan anggaran APBD di tahun 2023 antara lain:

1. Layanan administrasi kantor seperti kegiatan penyediaan jasa peralatan serta kelengkapan kantor,





2. Pengembangan wilayah transmigrasi meliputi menjalankan kerja sama baik kesesuaian wilayah pada pelaku dan sektor,
3. Pengembangan lembaga ketenagakerjaan yang terdiri dari pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan peraturan, dalam melaksanakan ketenagakerjaan,
4. Pengembangan wilayah transmigrasi sesuai penyediaan dan mengelola sarana dan prasarana sosial serta ekonomi pada kawasan transmigrasi yang menyusul dalam transmigrasi regional.

Sumber anggaran APBD yang memang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo melalui wawancara dengan LP mengatakan bahwa, sumber anggaran APBD di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang didapatkan lebih di Dana Alokasi Umum yang dialokasikan setiap tahunnya sebagai prioritas pembangunan. DAU akan menjadi komponen penting dalam peningkatan pendapatan daerah Boalemo ke depannya. Wawancara dengan WS (Kasubag Penyusunan Program) mengatakan bahwa, sumber anggaran dari APBD akan diperoleh alokasi Dana Umum yang menjadi komponen belanja pada APBN. Sehingga melihat beberapa pandangan dikemukakan bahwa APBD akan didapatkan dari Alokasi Dana Umum (DAU) yang memang sudah disusun sesuai dengan rencana program yang harus dilaksanakan dan dikerjakan dengan efektif.

Sehingga proses pencairan dana yang sudah ditunjukkan pada kebutuhan yang akan dilaksanakan pada program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Realisasi anggaran untuk dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo harus mampu melaksanakan sampai pelaksanaan pelaporan APBD yang sudah disesuaikan dengan kebijakan aturan yang ada dan mampu terealisasi dengan baik. Bahkan realisasi anggaran yang sudah disesuaikan akan mencapai rencana dan target yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai kebijakan dari pusat dan daerah Kabupaten Boalemo yang memang sudah berlaku. Langkah pelaporan anggaran APBD yang di dalamnya meliputi sistem pelaporan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo sehingga melaksanakan evaluasi setiap bulan pada mekanisme dan teknis yang ditetapkan.

Wawancara dengan NA memberikan penjelasan bahwa, mekanisme pelaporan anggaran APBD harus dilakukan pada setiap bulannya dengan memberikan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan bagian perencanaan. Sehingga dalam melaksanakan implementasi sangat diperlukan adanya kemungkinan pelaksanaan yang mengalami beberapa masalah seperti penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Tetapi kendala yang memang tidak dialami tim pelaksana anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Hasil wawancara dengan staf WS mengatakan bahwa, selaku pelaksana anggaran tidak hanya mengalami hambatan dalam melaksanakan program. Mekanisme yang dilaksanakan dengan baik dalam penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan beberapa hal, evaluasi pelaksanaan program memang sangat efektif. Sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan pelaksanaan sesuai mekanisme yang didasarkan pada aturan sudah ditetapkan. Program kerja harus dilaksanakan dengan rencana kerja



anggaran yang harus dilakukan evaluasi dan pelaporan setiap bulannya sesuai dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan TPAD dan evaluasi sesuai dengan tahapan perencanaan. Sehingga kendala yang dialami yang dilaksanakan sesuai dengan efektivitas pelaksanaan anggaran APBD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo. Efektivitas yang dilaksanakan dapat melihat sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang dilaksanakan. Efektivitas pelaksanaan anggaran Kabupaten Boalemo pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus mampu melaksanakan penyelesaian program atau kegiatan sesuai dengan target waktu dan batas anggaran yang sudah tersedia. Sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan sesuai dengan tahapan keberhasilan pada apa yang dikerjakan sesuai dengan ketepatan waktu dengan efektif dan efisien dalam mengerjakan program yang dilaksanakan tepat waktu.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boalemo sumber anggaran yang berasal dari APBD harus dimanfaatkan melalui Dana Alokasi Umum atau DAU. Dimana pelaksanaan dan pengalokasian anggaran harus memuat seperti tersedianya lahan dalam hal ini sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tenaga kerja seperti *job fair*, tersedianya sarana dan prasarana seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat membantu pencari kerja baik dari perusahaan dan calon karyawan. Implikasi penelitian adalah efektivitas pelaksanaan anggaran yang didapatkan melalui APBD diharapkan dapat dilaksanakan setiap tahun dengan efektif sehingga perlu adanya perencanaan, prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang dibahas baik di OPD atau di Pemerintah Daerah kabupaten Boalemo. Keterbatasan dalam penelitian adalah belum maksimalnya peneliti dalam mendapatkan data secara lengkap karena proses dan mekanisme anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih sangat kurang diuraikan dalam hasil wawancara terutama dengan beberapa informan.

Berdasarkan kesimpulan maka, adapun saran dalam penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Boalemo hendaknya dapat mempertahankan standar proses dan sistem pengelolaan anggaran khususnya APBD yang memang sudah dibuktikan berjalan dengan efektif sehingga mampu dipertahankan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan dengan sangat baik. Sesuai dengan kebutuhan anggaran, pelaksanaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusti, W. O. D., & Mahmuda, D. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem & Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 4(19), 68-87.
- Aji, A. B. (2019). Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi. *Lex Renaissance*, 2(2), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss2.art1>



- Dewi, S., & Yanto, H. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate GOVERNANCE, Terhadap Pengungkapan Corporate Social Resposinbility. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), 64–78.
- Dwiarsyah, T., Lizar, A., & Yefriza, Y. (2021). Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 35–52.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32663/pareto.v4i1.1833>
- Febriantoko, J. (2017). Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Di Indonesia: Pendekatan Kualitatif. *Media Trend*, 12(2), 143–155.
- Fuad, M., & T. P. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research Dilengkapi Contoh, Proses dan Hasil 6 Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Literasi Indonesia.
- John Ivancevich dkk. (2016). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.
- Kemuning, S. A. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 87(1).
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP. YKPN.
- Punto, R. (2014). Konsep Efektivitas. *Jurnal yang Dipublikasikan, Universita*.
- Rahmadhani, S. N. (2018). EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI ATAS JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK OLEH PT PLN (Persero): STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1816>
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Iniversitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpek.23845.20.2.2019>
- Salahudin, I., Nugroho, G. W., & Kartini, T. (2020). Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penjualan. *UDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(1), 194–207.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.1228>
- Sasongko, Catur dan Parulian, S. R. (2019). *Anggaran*. Salemba Empat.
- Subiyanto, S. (2021). *Monograf Pengembangan Mobile Learning Menggunakan Mobile Dick Care and Carey*. Lakeisha.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhardi. (2019). *Budgeting Perusahaan, Koperasi dan Simulasinya* (E. by



A.Sularso (ed.); Pertama). GAVA MEDIA.

Sutra, M. A. A., & Prabawa, D. K. G. (2020). Pengaruh Efektivitas, Pemanfaatan dan Kesesuaian Tugas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Di Desa Panjer. *TIERS Information Technology Journal*, 1(1), 19–24.

Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.